PERAN PEMERINTAH DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TAKISUNG KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT

Dewi Merdayanty*

ABSTRAK

Tujuan penulisan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Metodologi menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif sebanyak 50 responden dan analisis penulisan menggunakan rumus prosentase. Hasil yang ditemukan berdasarkan hasil kuesioner mayoritas pernyataan responden memilih sangat setuju dan setuju, dengan nilai tertinggi adalah pada indikator fungsi delegatif pada instrumen kerjasama antara kepala desa dan aparat desa berjalan dengan baik, dikarenakan pendelegasian Kelapa Desa selalu memberikan kerangka pemikiran yang terkait dengan permasalahan dalam pembangunan desa. Sedangkan mayoritas pernyataan dengan nilai terendah adalah Pemerintah Desa sebelum melakukan Musrembang lebih dulu mengadakan rapat dengan masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Desa perlu mempertimbangkan kondisi atau waktu senggang masyarakat untuk dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Saran bagi Pemerintah Desa perlu mencari alternatif kondisi yang tepat untuk mengadakan pertemuan kepada masyarakat dan memberikan motivasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa program-program pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Pemerintah Desa, Masyarakat pesisir, Pembangunan.

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dalam pembangunan, maka partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangan dan dapat menikmati hasil pembangan di wilayahnya. Masyarakat lokal merupakan bagian yang paling memahami kondisi daerahnya, tentu mereka dapat memberikan masukan yang sangat berharga dalam melaksanakan pembangun-an, baik potensi yang dimiliki wilayah dan permasalahan yang dihadapi melalui pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki masyarakat lokal.

Mewujudkan kegiatan pembangunan dalam Negara demokratis, khususnya di Indonesia telah terbit Undang-Undang yang mengatur bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 208 berbunyi “tugas dan kewajiban kepala desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa yaitu pada pasal 8 yang berisi: “Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

* *Tenaga Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan*

huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat”. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas maka telah menjadi suatu kewajiban Pemerintah Desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Secara umum kehidupan masyarakat pesisir tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai dimana kelangsungan hidup mereka berbasis pada ekonomi lingkungan yang hidup sebagai suatu kesatuan sosial, namun sangat memungkinkan terdapat beberapa warga yang tinggal di wilayah pantai bukan bermata pencaharian sebagai nelayan. Kehidupan sosial masyarakat pesisir dengan aktivitas ekonomi perikanan tangkap dikalangan nelayan Madura misalnya, terdapat tiga pihak yang berperan besar, yaitu pedagang perantara (pengamba), nelayan pemilik perahu dan nelayan buruh (Kusnadi, 2000).

Aktivitas masyarakat pesisir di Desa Takisung berbentuk aktivitas ekonomi perikanan tangkap namun tidak semua kehidupan sosial mereka berperan sebagai salah satu peran sebagai pengamba saja atau pemilik perahu saja justru kehidupan nelayan buruh lebih banyak merangkap sebagai pengamba yang dilakukan dalam suatu keluarga. Dan sudah tentu aktivitas masyarakat ini berlangsung setiap hari tanpa mengenal hari libur kecuali keadaan lingkungan sedang tidak bersahabat bagi nelayan.

Kondisi masyarakat diatas dalam bekerja mencari nafkah berdampak pada masih sulitnya warga setempat untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan desa, partisipasi yang dilakukan masyarakat untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan atau rapat koordinasi lainnya menjadi pertimbangan bagi mereka, antara mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau berpartisipasi sesuai

anjuran Pemerintah Desa setempat, berdasarkan observasi penulis sebagian besar masyarakat masih cenderung untuk memilih mencari nafkah apabila kondisi alam sangat bersahabat bagi para nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat rendahnya kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan padahal apabila pembangunan telah berhasil dilaksanakan masyarakatpun akan menikmati hasil pembangunan tersebut.

PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa Rivai (2004) menyatakan fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat. Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional sebagai berikut:

1. Fungsi instruktif
Bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana pemerintah dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan.
2. Fungsi konsultatif
Bersifat komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan konsultasi kepada masyarakat yang dipimpin.

3. Fungsi partisipasi

Bersifat mengaktifkan masyarakat baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya yang dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama yang tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

4. Fungsi delegasi

Bersifat memberikan pelimpahan wewenang dengan dasar memberikan kepercayaan untuk membuat dan menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah menurut ketentuan yang diberlakukan.

5. Fungsi pengendalian

Bersifat bersifat memberikan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan agar aktivitas masyarakat terarah untuk tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

Pengertian partisipasi masyarakat

Menurut Tjokromidjojo partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

(Safi'i:2007).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuhkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dari masyarakat secara sadar, bergairah dan tanggung jawab (Tjokroamidjoojo:2002).

METODELOGI

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui keusioner, responden sebanyak 50 orang yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa responden dianggap representatif dalam memberikan informasi untuk keakuratan data yang diperoleh. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Metode analisis penulisan menggunakan rumus prosentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Takisung tentu tidak terlepas dari peranan pemerintah desa sebagai motivator dalam menyampaikan setiap program-program pembangunan pemerintah kepada masyarakat baik perencanaan, pelaksanaan maupun memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Berikut tabel hasil kuesioner peran Pemerintah Desa Takisung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil kuesioner diatas dapat diketahui mayoritas pernyataan responden melalui instrumen adalah 46% responden menyatakan setuju pelaksanaan pembangunan selalu diinstruksikan oleh Kepala Desa, 40% responden menyatakan sangat setuju Pemerintah desa melaksanakan komunikasi dalam menentukan dan melaksanakan program pembangunan, 60% responden menyatakan sangat setuju Pemerintah desa menetapkan keputusan dalam pembangunan selalu melakukan konsultasi dengan masyarakat, 32% responden menyatakan setuju Pemerintah desa sebelum melakukan Musrembang lebih dulu mengadakan rapat dengan masyarakat, 50% responden menyatakan setuju Pemerintah desa berusaha dengan aktif mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan desa, 54% responden menyatakan

setuju Pemerintah desa melakukan sosialisai pembangunan desa untuk tujuan bersama, 48% responden menyatakan sangat setuju Pemerintah desa melaksanakan pembangunan dengan mengadakan koordinasi dengan masyarakat, 74% responden menyatakan sangat setuju kerjasama antara kepala desa dan aparat desa berjalan dengan baik, 54% responden menyatakan setuju Pemerintah desa memberikan bimbingan dan arahan dalam menentukan dan melaksanakan pembangunan, 54% responden menyatakan setuju Pemerintah desa melakukan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan dan hasil pembangunan.

Tabel Peran Pemerintah Desa Takisung untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

No.	Indikator	Instrumen	Pernyataan responden							
			Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju	
			f	%	f	%	f	%	f	%
1	Fungsi Instruktif	Setiap pelaksanaan pembangunan selalu ada instruksi dari Kepala Desa	15	30	23	46	10	20	2	4
		Pemerintah desa melaksanakan fungsi komunikator dengan baik dalam menentukan dan melaksanakan program pembangunan	20	40	12	24	13	26	5	10
2	Fungsi Konsultatif	Pemerintah desa menetapkan keputusan dalam pembangunan selalu melakukan konsultasi dengan masyarakat	30	60	14	28	6	12	0	0
		Pemerintah desa sebelum melakukan Musrembang lebih dulu mengadakan rapat dengan masyarakat	9	18	16	32	13	26	1	2
3	Fungsi Partisipatif	Pemerintah desa berusaha dengan aktif mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan desa	20	40	25	50	5	10	0	0
		Pemerintah desa melakukan sosialisai pembangunan desa untuk tujuan bersama	11	22	27	54	10	20	2	4
4	Fungsi Delekatif	Pemerintah desa melaksanakan pembangunan dengan mengadakan koordinasi dengan masyarakat	24	48	20	40	5	10	1	2
		Kerjasama antara kepala desa dan aparat desa berjalan dengan baik	37	74	13	26	0	0	0	0
5	Fungsi Pengendalian	Pemerintah desa memberikan bimbingan dan arahan dalam menentukan dan melaksanakan pembangunan	22	44	27	54	1	2	0	0
		Pemerintah desa melakukan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan dan hasil pembangunan	23	46	27	54	0	0	0	0

Sumber : Data Tahun 2014.

Dari uraian jawaban mayoritas responden jumlah tertinggi adalah pada kerjasama antara kepala desa dan aparat desa berjalan dengan baik melalui pen-delegasian yang merupakan pelimpahan wewenang sementara kepada bawahan, hal ini sangat membantu pemerintah Desa Takisung dalam menjalankan tugas sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan dengan lancar, Kepala Desa Takisung dalam memberikan pendelegasian baik kepada sekretaris desa maupun kepala urusan lainnya selalu berupaya untuk memberikan gambaran sebagai kerangka pemikiran yang terkait dengan persoalan atau permasalahan yang ada. Sedangkan jawaban mayoritas responden terendah adalah Pemerintah desa sebelum melakukan Musrembang lebih dulu mengadakan rapat dengan masyarakat, hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Desa Takisung untuk menentukan kondisi yang lebih tepat mengadakan rapat kepada masyarakat setempat misalnya dengan memilih waktu yang senggang bagi mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil kuesioner mayoritas pernyataan responden memilih sangat setuju dan setuju, dalam mayoritas pernyataan tersebut yang mendapatkan nilai tertinggi adalah pada indikator fungsi delegatif dengan instrumen kerjasama antara kepala desa dan aparat desa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan setiap pendelegasian yang dipercayakan, Kepala Desa selalu memberikan kerangka pemikiran yang terkait dengan permasalahan dalam pembangunan desa. Sedangkan mayoritas pernyataan yang mendapatkan nilai terendah adalah Pemerintah Desa sebelum melakukan Musrembang lebih dulu mengadakan

rapat dengan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Desa perlu mempertimbangkan kondisi yang lebih tepat ketika masyarakat memiliki waktu senggang sehingga mereka dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Perlu alternatif-alternatif kondisi yang digunakan untuk dapat mengadakan pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa takisung sehingga rencana dan pelaksanaan pembangunan dapat efektif dan efisien.

Motivasi yang lebih intensif oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk lebih tinggi meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwa program-program pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga dukungan dan tingkat kepedulian lebih tinggi dari masyarakat Desa Takisung.

DAFTAR PUSTAKA

Boelaars, Yan, 1984, *Kepribadian Indonesia Modern: Suatu Penelitian Antropologi Budaya*, Gramedia, Jakarta.

Kusnadi, 2000, *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*, Humaniora Utama Press, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.

Rivai Veithzal, 2004, *Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Safi'I, M., 2007, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Persepektif Teoritik*, Averroes Press, Malang.